

# ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SINJAI

Hasdiana S\*)

Dosen Universitas Muslim Maros

Email: dhi.wawan@gmail.com

*Abstract* : The results showed that the efficiency ratio analysis results showed that the average level of efficiency of budget management at the Department of Trade and Industry Sinjai during 2011 to 2015 was 41%, meaning efficient budget management implemented. The results of the analysis of the effectiveness ratio showed an average level of efficiency of budget management at the Department of Trade and Industry Sinjai during 2011 to 2015 was 87%, meaning effect budget management implemented.

*Keywords*: Efficiency and Effectiveness of Budget Managemen

## PENDAHULUAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, tentu harus berdasar pada prinsip-prinsip efisiensi dalam sumber dana dan pemanfaatan seoptimal mungkin teknologi yang dimiliki sehingga dapat terwujud efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, baik dari sudut produksi, konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai. Salah satunya yaitu dengan membuat rencana anggaran.

Rencana anggaran diperlukan manajemen untuk dapat menjabarkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan sebagai pedoman kerja secara sistematis. Selain itu anggaran juga berfungsi untuk mengetahui segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan penting untuk meningkatkan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan.

Di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai setiap tahunnya juga membuat rencana

anggaran atau yang biasa disebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB), agar dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan beberapa hal yaitu : (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja. (Harun, 2009 : 113)

Fenomena yang terkait dengan penganggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai masih memprihatinkan terutama pengeluaran yang belum mampu mendukung prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabilitas, transparan, *value of money*. Pengelolaan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan dan skala prioritas dan masih kurang mencerminkan aspek efisiensi dan efektifitas karena kualitas perencanaan anggaran relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan untuk meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan. Sementara itu, pengeluaran terus meningkat sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif. Pengelolaan anggaran harus dapat dilakukan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat.

Oleh karena itu, dalam rangka pertanggungjawaban publik, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai wajib melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan sebagai kajian terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan masyarakat, khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai dalam hal menganalisis efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggarannya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai”.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai telah dilakukan dengan efisien ?
2. Apakah pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai telah dilakukan dengan efektif ?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mendeskripsikan efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai.

2. Mendeskripsikan efektifitas pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Keuangan Daerah**

Mamesah (2005:16) mengemukakan bahwa keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Beberapa batasan tentang Keuangan Daerah yang pada dasarnya menetapkan bahwa keuangan daerah tidak lain adalah segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya aset berupa barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah. Bertitik tolak pada batasan tersebut, maka ruang lingkup keuangan daerah, akan dihadapkan kepada persoalan jenis-jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Kekayaan yang dikelola langsung

Kekayaan daerah baik berupa uang maupun berupa barang milik daerah terutama digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan menjadi bagian dari otonomi daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk melaksanakan urusan rumah tangganya, maka pemerintah daerah didukung oleh sarana berupa kekayaan yang dapat digunakan secara langsung, sehingga kekayaan tersebut dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Adanya kekayaan yang dikelola langsung tersebut, tidak lain agar pemerintah daerah dapat dengan mudah melakukan berbagai tugasnya dalam batas-batas wewenang yang diberikan melalui pemberian otonomi daerah. Ini berarti bahwa semakin besar otonomi yang diberikan kepada daerah, semakin luas wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dengan demikian berdampak perlunya memiliki kekayaan yang semakin besar pula.

## 2. Kekayaan yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang tidak dikelola langsung merupakan bagian dari kekayaan daerah, sehingga sewaktu-waktu jika diperlukan dapat digunakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan dimaksud juga dijelaskan oleh Mamesah (2005: 22-23) dengan mengemukakan bahwa kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang pegurusannya tidak dimaksudkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah.

### A. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud menurut Yani (2008:346) merupakan subsistem dari

sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan daerah.

Dalam otonomi daerah, masalah yang dihadapi tidak hanya pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, akan tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi juga harus diimbangi dengan sejauh mana sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Darise (2006:25), mengemukakan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah :

1. Efisien, merupakan pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
2. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
3. Efektif, pencapaian dengan hasil target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
5. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan dan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
7. Kepatuhan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

## **B. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan (SKPD) yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan (SKPD) atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

## **C. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**

### **1. Efisiensi Pengelolaan Anggaran**

Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Efisiensi dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efektif (Suparmoko, 2007:46).

Efisiensi akan terjadi jika dengan jumlah sumberdaya yang sama dapat dihasilkan lebih banyak

produksi daripada sebelumnya; atau jumlah produksi yang sama dapat dihasilkan dari pemakaian sumber daya yang lebih sedikit dari pada sebelumnya (Samuelson dan Nordhaus, 2008:65).

Menurut Mubiyarto dan Hamid (2006:189-190), efisiensi adalah perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai untuk menghasilkan keluaran tersebut. Sedangkan menurut Siagian (2007:149) efisiensi yaitu perbandingan yang positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang dipergunakan. Dengan demikian usaha untuk meningkatkan efisiensi dihubungkan dengan biaya yang relatif kecil untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau dengan biaya tertentu diperoleh hasil yang lebih banyak.

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan hasil presentase yang besar, maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan adalah cukup rendah sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya cukup tinggi atau sangat efisien. Demikian pula sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan tingkat presentasenya yang kecil, berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan output relatif tinggi sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya rendah atau tidak efisien.

### **2. Efektifitas Pengelolaan Anggaran**

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Menurut Ihyaul (2009: 26) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana

dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian, 2001: 24).

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. (Kumiawan, 2005:109). Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat.

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila suatu rasio yang dicapai mencapai 100%. Namun, demikian semakin tinggi ratio efektivitas, menggambarkan kemampuan penggunaan biaya semakin baik.

Menurut Jones dan Pendlebury (2006:14), efektivitas adalah sukses mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, efektivitas hanya berhubungan dengan output atau hasil. Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa derajat efektivitas tidak menyatakan apa-apa tentang berapa besar pengeluaran untuk mencapainya. Jadi, yang menjadi ukurannya adalah hasilnya (*output*).

### **Penelitian Terdahulu**

Julita (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif. Hanya saja pada tahun 2010 perhitungan efektivitas anggaran pendapatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai tidak efektif dalam menetapkan target anggaran pendapatan karena hanya mencapai 11,28%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pendapatan, pada tahun 2009-2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai efisien. Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran belanja, pada tahun 2009-2012 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja. Hal ini berdampak baik bagi Instansi karena dapat melakukan penghematan dalam menggunakan anggaran belanja.

Lukman Wahid, (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektifitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas verifikator, insentif serta sarana dan prasarana terhadap efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah untuk dapat menurunkan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menguji faktor kualitas verifikator, insentif serta sarana dan prasarana terhadap efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Biro Keuangan untuk dapat menurunkan terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Dimana insentif merupakan faktor yang dominan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas sistem dan

prosedur verifikator Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Nur Mawati Mambulu (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis rasio keuangan terhadap laporan realisasi anggaran berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektifitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan terhadap rasio efektifitas PAD yang berarti bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai mampu mengelola sumber-sumber PAD dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target realisasi anggaran sebesar 100%. Sedangkan efektivitas terhadap belanja daerah belum tercapai meskipun nilai resikonya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan oleh nilai rasionya yang tidak mencapai target 100%. Pada hasil analisis efisiensi menunjukkan adanya keberhasilan atas pemungutan PAD dengan biaya perolehannya yang relatif kecil sehingga nilai rasionya kurang dari 100%.

Berdasarkan para penelitian di atas, dijadikan sebagai acuan dan perbandingan agar nantinya hasil penelitian yang dilakukan dapat melihat adanya perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu. Tentunya, hasil penelitian ini dapat sama dan dapat berbeda, karena adanya persamaan dan perbedaan dari variabel-variabel yang diteliti dan obyek penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif yaitu menguraikan dan

menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai.

### **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, mulai bulan Agustus sampai September 2016. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam bidang industri dan perdagangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data tersebut adalah melalui Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah serta memperoleh informasi melalui buku-buku, publikasi, laporan, serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data kuantitatif, yaitu analisis data yang menggambarkan efisiensi, efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai, dengan menggunakan beberapa rasio seperti:

#### a. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efisiensi diambil dari Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kriteria rasio efisiensi keuangan daerah.

Tabel 1.  
Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	100% ke atas	Tidak efisien
2	90 – 100%	Kurang efisien
3	80 – 90 %	Cukup efisien
4	60 – 80%	Efisien
5	Kurang 60%	Sangat Efisien

b. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah/kota dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kriteria rasio efektivitas keuangan diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman penilaian kinerja keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Target anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	100%	Sangat efektif
2	90 – 100%	Efektif
3	80 – 90 %	Cukup efektif
4	60 – 80%	Kurang Efektif
5	Kurang 60%	Tidak efektif

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Sinjai dan diberitakan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 35 Tahun 2012 menjelaskan bahwa :

**Tugas Pokok :**

- a. Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Melaksanakan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan dan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai**

Menurut Mahmudi (2007), efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi belanja untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 (seratus) persen.

Untuk menunjang pencapaian target penerimaan retribusi izin gangguan, Dinas perindustrian dan perdagangan melakukan kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan

dan pengembangan usaha (pelayanan perizinan). Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sinjaiselama tahun 2011 sampai 2015 tersebut, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Rasio Efisiensi Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai Tahun 2010-2015

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2011	233.734.000	93.285.000	39,91	Sangat Efisien
2012	143.643.760	69.380.000	48,30	Sangat Efisien
2013	187.782.425	54.599.000	29,08	Sangat Efisien
2014	198.976.920	84.735.000	42,59	Sangat Efisien
2015	167.726.000	83.014.000	49,49	Sangat Efisien
<b>Rata-rata</b>	<b>186.372.621</b>	<b>77.002.600</b>	<b>41</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai mengalami fluktuasi selama tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 rasio efisiensi sebesar 39,91 % menjadi 48,30% pada tahun 2012. Dari sudut pandang efisiensi perubahan ini dipandang sebagai penurunan rasio efisiensi. Tetapi masih dalam kriteria yang sangat efisien. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan rasio efisiensi sebesar 19,22% menjadi 29,08% dan memiliki kriteria sangat efisien. Pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan rasio efisiensi sebesar 13,51% menjadi 42,59% tetapi masih pada kategori sangat efisien. Pada tahun 2015 juga mengalami penurunan rasio efisiensi menjadi 49,49% dan masuk dalam kategori sangat efisien. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai Tahun 2011 sampai Tahun 2015 sudah efisien dengan rasio efisiensi dibawah 60%.

#### **Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai**

Anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai akan dinilai baik kinerjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Laporan realisasi anggaran dapat diketahui secara langsung besarnya anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasinya. Menurut Mahmudi (2010:157), selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: selisih disukai (*favourable variance*) yaitu realisasi belanja yang lebih dari anggarannya, dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*) yaitu realisasi belanja yang lebih besar dari anggarannya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjaiselama tahun 2011 sampai 2015 tersebut, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Rasio Efektifitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran Belanja		Rasio Efektifitas (%)	Kriteria
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2011	5.924.898.655	4.177.814.841	70,51	Kurang Efektif
2012	8.123.085.426	7.349.873.779	90,48	Efektif
2013	5.813.423.199	4.925.735.648	84,73	Cukup Efektif
2014	4.944.353.964	4.330.815.927	87,59	Cukup Efektif
2015	7.118.902.949	6.924.238.242	97,27	Efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>6.384.932.839</b>	<b>5.541.695.687</b>	<b>87</b>	

Selama periode anggaran tahun 2011-2015, rasio efektifitas anggaran belanja berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami penurunan kadang mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 rasio efektifitas 70,51% mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 19,97% menjadi 90,48%. Setelah itu mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2013 sebesar 5,75% menjadi 84,73%. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 87,59%. Dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 97,27%. Secara keseluruhan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rasio efektifitas anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai memiliki tren yang berubah-ubah. Tahun 2011 rasio efektifitas masih dalam kategori kurang efektif, tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan kategori cukup efektif sedangkan tahun 2012 dan tahun 2015 sudah menunjukkan kategori efektif dengan kisaran presentase antara 90% - 100%.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai selama tahun 2011 sampai 2015 adalah 41%, artinya pengelolaan anggaran terlaksana sangat efisien.

Pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisiensi, yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil maksimum.

2. Hasil analisis rasio efektifitas menunjukkan rata-rata rasio efektifitas pengelolaan anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai tahun 2011 sampai 2015 sebesar 87%, artinya pengelolaan anggaran sudah memenuhi kriteria efektif karena realisasi anggaran yang sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2011 rasio efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana

### Saran

1. Efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai pada tahun 2011 sampai tahun 2015 hendaknya tetap dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya, dengan tetap menekan peningkatan biaya-biaya yang dapat menyebabkan pemborosan
2. Perlu mengaktifkan pengelolaan anggaran dengan memaksimalkan pemberdayaan sumber daya yang ada dan juga pemahaman konsep

belanja agar perencanaan sedapat mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi I, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Baswir, 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Baswir, Revisond, 2005, *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Darise, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Ketujuh, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Davey, K.J., 2000. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Terjemahan oleh Amirullah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Deddi dan Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Garrison, Norren and Brewer, 2007, *Management Leading and Collaborating in a Competitive world 7th ed.* McGraw hill, NY.
- Gasperz, 2008, *Total Quality Manajemen*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat Media. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Harun, 2008. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Herawati dan Sunarto, 2004, *Budgetting, Penganggaran dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ihyaul, 2009, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*. BPFE, UBM Yogyakarta.
- Jones, R dan M. Pendlebury. 2006. *Public Sector Accounting*. 5<sup>th</sup> Edition. Pitman Publishing, London
- .  
Julita dan Jufrizen, 2012. *Budgeting*. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- Julita, 2013, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara*, Tesis, PPs UNHAS, Makassar (Tidak Dipublikasikan).
- Kumiawan, 2005, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Lukman Wahid, 2011, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektifitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Selatan*. Tesis, PPs UNHAS, Makassar (Tidak Dipublikasikan).
- Mamesah, D.J., 2005. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mulyadi, 2006, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.

- Munandar, 2006, Manajemen Keuangan Modern (Analisis, Perencanaan, dan Kebijakan), Bumi Aksara, Jakarta.
- Mustopadidjaya, 2007, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nafarin, M., 2004. Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nur Mawati Mambulu, 2010, Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai. Tesis, PPs UNHAS, Makassar (Tidak Dipublikasikan).
- Rowan, Rowan dan Pendlebury, Maurice. 2002. *Public Sector Accounting*, 5<sup>th</sup> Edition. UK: Prentice Hall.
- Salam, S. Dharma, 2002, Manajemen Pemerintahan Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 2004. Ilmu Makro ekonomi. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Gunung Agung, Jakarta.
- Suparmoko, 2007, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, BP2E, Yogyakarta.
- Sustry Ambariani, 2005, Manajemen Biaya: Dengan Tekanan Stratejik. Edisi dua. Salemba Empat, Jakarta.
- Simamora, 2007, Manajemen Operasional, Ghalia, Indonesia.
- Ulum, Ihyaul, 2004. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Yani, Achmad, 2008, Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan:  
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengalami perubahan menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.